Sumber : https://bangka.tribunnews.com/
Tanggal : 25 Maret 2026
Halaman : -
Klasifikasi : RPJMD 2025-2029 Akhirnya Ditandatangani di Paripurna, Udin Siapkan Visi Kota Pangkal Pinang SMART

Berita Pangkalpinang

RPJMD 2025-2029 Akhirnya Ditandatangani di Paripurna, Udin Siapkan Visi Kota Pangkalpinang SMART

Tayang: Rabu, 25 Maret 2026 12:59 WIB

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Hendra



PENANDATANGANAN RPJMD - Penandatanganan dokumen bersama oleh Wali Kota Pangkalpinang Saparudin, dan Wakil Ketua I DPRD Kota Pangkalpinang, Hibir, didampingi, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD, dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (25/3/2026).

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Setelah sempat tertunda akibat tidak kuorum, Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang akhirnya digelar, Rabu (25/3/2026) dengan agenda utama pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Pangkalpinang ini sekaligus menjadi agenda penting pertama Pemerintah Kota Pangkalpinang usai libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Sebelumnya, rapat paripurna dengan agenda yang sama sempat batal dilaksanakan karena minimnya kehadiran anggota DPRD sehingga tidak memenuhi kuorum.

Kali ini, rapat dapat dilangsungkan setelah jumlah kehadiran anggota dewan mencukupi. Dari total 30 anggota DPRD Kota Pangkalpinang, tercatat 18 orang hadir, satu orang sakit, tujuh orang izin, dan lima lainnya tanpa keterangan.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pangkalpinang, Hibir, dan dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam agenda rapat, DPRD menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) IV terhadap Raperda RPJMD 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD, serta penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Pangkalpinang.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen bersama oleh Wali Kota Saparudin dan pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus IV, atas komitmen dan kesungguhan dalam membahas Raperda RPJMD hingga dapat disetujui.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pansus 4 DPRD Kota Pangkalpinang atas komitmen, dedikasi, dan kesungguhan dalam membahas Raperda RPJMD Tahun 2025-2029," ujarnya.

Ia berharap dokumen RPJMD yang telah disepakati ini dapat menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkalpinang lima tahun ke depan.

Saparudin menjelaskan, RPJMD 2025-2029 dirancang untuk mewujudkan visi Kota Pangkalpinang yang "SMART" yakni Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh, yang dijabarkan melalui berbagai program prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari tahapan untuk mencapai visi jangka panjang "Pangkalpinang BERKELAS 2045" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"RPJMD ini menjadi jembatan antara visi jangka panjang dengan program pembangunan lima tahunan yang lebih konkret dan terukur," katanya.

Ia menegaskan, sinkronisasi antara RPJPD dan RPJMD menjadi kunci agar pembangunan daerah berjalan berkesinambungan, terarah, dan tidak terputus antarperiode pemerintahan.

Lebih lanjut, Saparudin menyampaikan bahwa setelah disetujui bersama DPRD, Raperda RPJMD tersebut akan disampaikan kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sumber: bangkapos.com

Berita Populer
70 Anak di Bangka Jalani Transfusi Seumur Hidup, Derita Thalasemia, Kenal...
15 jam lalu
Daftar Lengkap Harga TBS Sawit 10-15 Mei 2026 di Babel Klasifikasi Umur 3...
17 jam lalu
Kasus Pencurian Batu Pemecah Ombak Pantai Kembang Kemilau Baten...
23 jam lalu
Kabar Tambang Tembelok-Keranggan Beroperasi Lagi, Polres Babar...
23 jam lalu
Kerap Terkena Banjir, Kawasan Simpang Garasi

Sumber : https://bangka.tribunnews.com/
Tanggal : 21 April 2026
Halaman : -
Klasifikasi : Wakil Wali Kota Harap Pemilihan RT/RW di Pangkal Pinang Berjalan Lancar dan Kondusif

Berita Pangkalpinang

Wakil Wali Kota Harap Pemilihan RT/RW di Pangkalpinang Berjalan Lancar dan Kondusif

Tayang: Selasa, 21 April 2026 14:33 WIB

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Hendra



Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, berharap pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW yang tengah berlangsung di berbagai kelurahan dapat berjalan lancar, tertib, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Menurut Dessy, proses pemilihan RT/RW bukanlah hal yang sederhana. Peserta harus melalui beberapa tahapan, terutama dari sisi administrasi yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran.

"Semoga berjalan dengan lancar, dan masyarakat bisa men-support. Walaupun prosesnya cukup panjang dan banyak hal yang harus dilalui, khususnya terkait administrasi," ujar Dessy, kepada Bangkapos.com, Selasa (21/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang sebelumnya sempat mengajukan peraturan wali kota (perwako) baru sebagai dasar pelaksanaan pemilihan RT/RW.

Namun, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan, sehingga pelaksanaan saat ini tetap mengacu pada regulasi yang telah berlaku sebelumnya.

"Kami sempat mengajukan perwako baru, tetapi tidak disetujui. Jadi saat ini kita tetap menggunakan perwako yang lama sebagai dasar pelaksanaan," jelasnya.

Di tengah dinamika tersebut, Dessy mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama proses pemilihan berlangsung.

Ia menegaskan bahwa aktivitas kampanye diperbolehkan sebagai bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara sehat dan tidak memicu konflik di tengah masyarakat.

"Kampanye silakan saja, itu bagian dari proses demokrasi. Tapi jangan sampai menimbulkan gesekan atau pertentangan. Hindari cara-cara yang bisa merusak kedamaian di lingkungan," tegasnya.

Lebih lanjut, Dessy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini, sekaligus menjaga ketertiban dan suasana yang harmonis.

Ia berharap, melalui proses yang berjalan aman dan damai, pemilihan RT dan RW di Pangkalpinang dapat melahirkan pemimpin lingkungan yang mampu mengayomi warga serta menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.

"Harapannya tentu kita ingin pemilihan ini berjalan aman, damai, dan menghasilkan pengurus RT/RW yang benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com

Berita Populer
70 Anak di Bangka Jalani Transfusi Seumur Hidup, Derita Thalasemia, Kenal...
15 jam lalu
Daftar Lengkap Harga TBS Sawit 10-15 Mei 2026 di Babel Klasifikasi Umur 3...
16 jam lalu
Kasus Pencurian Batu Pemecah Ombak Pantai Kembang Kemilau Baten...
23 jam lalu
Kabar Tambang Tembelok-Keranggan Beroperasi Lagi, Polres Babar...
23 jam lalu
Kerap Terkena Banjir, Kawasan Simpang Garasi

Sumber : https://bangka.tribunnews.com/
Tanggal : 4 Mei 2026
Halaman : -
Klasifikasi : Soroti Kebocoran Retribusi dan Pajak Daerah, Wali Kota Pangkal Pinang Siapkan Sistem Digital

Berita Pangkalpinang

Soroti Kebocoran Retribusi dan Pajak Daerah, Wali Kota Pangkalpinang Siapkan Sistem Digital

Tayang: Senin, 4 Mei 2026 14:58 WIB

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Hendra



BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyoroti sejumlah catatan penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait rekomendasi dari DPRD yang dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota ke depan.

Dalam wawancara usai Rapat Paripurna DPRD, Saparudin yang akrab disapa Prof. Udin mengungkapkan, terdapat tiga isu utama yang harus segera disikapi secara serius oleh jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Yang pertama, masih banyaknya kebocoran pada sektor retribusi dan pajak. Salah satu penyebabnya adalah sistem yang masih manual," ujar Saparudin kepada awak media, Senin (4/4/2026).

Menurutnya, sistem manual membuka celah terjadinya ketidakefisienan hingga potensi kebocoran pendapatan daerah. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah kota.

Selanjutnya, ia menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta sinergi dengan instansi terkait.

"Koordinasi lintas OPD masih perlu diperkuat. Ini penting agar program-program yang dijalankan bisa lebih optimal dalam pelaksanaannya," katanya.

Selain itu, Saparudin juga menekankan perlunya pembaruan regulasi daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun peraturan wali kota (Perwako), agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

"Perda dan perwako harus terus kita evaluasi dan revisi, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, persoalan aset daerah juga menjadi perhatian serius. Saparudin mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 1.500 aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum tersertifikasi, termasuk jalan setapak.

"Yang sudah tersertifikasi sekitar 2.500 aset. Tahun ini kita targetkan 700 aset lagi bisa diselesaikan, dan mudah-mudahan dalam dua tahun ke depan seluruhnya tuntas," ujarnya.

Sebagai langkah konkret untuk menutup potensi kebocoran pendapatan, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga tengah menyiapkan peluncuran aplikasi terpadu atau super app dalam waktu dekat.

"Insyallah dua bulan lagi kita akan launching super app Pangkalpinang. Nantinya, sistem retribusi seperti parkir dan sampah sudah berbasis digital menggunakan QRIS," jelasnya.

Ia menambahkan, dari sisi kesiapan teknologi, aplikasi tersebut telah rampung, dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian regulasi teknis sebagai payung hukum implementasinya.

"Kalau dari sisi aplikasi sudah selesai, tinggal peraturan teknis yang sedang kita bahas," pungkasnya.

Langkah digitalisasi ini diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus menjawab berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRD dalam pembahasan LKPJ 2025.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com

Berita Populer
70 Anak di Bangka Jalani Transfusi Seumur Hidup, Derita Thalasemia, Kenal...
15 jam lalu
Daftar Lengkap Harga TBS Sawit 10-15 Mei 2026 di Babel Klasifikasi Umur 3...
16 jam lalu
Kasus Pencurian Batu Pemecah Ombak Pantai Kembang Kemilau Baten...
23 jam lalu
Kabar Tambang Tembelok-Keranggan Beroperasi Lagi, Polres Babar...
23 jam lalu
Kerap Terkena Banjir, Kawasan Simpang Garasi

Sumber : Bangka Pos
Tanggal : 5 Mei 2026

Halaman : 3
Klasifikasi : DPRD Pangkal Pinang Setujui LKPj Wali Kota 2025 ”Tegaskan Fungsi Pengawasan dan Rekomendasi Strategis”

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

www.setwan.pangkalpinangkota.go.id @Hpangkalpinang www.facebook.com/humasdprd.pangkalpinang @humasdprdpangkalpinang



DPRD Pangkalpinang Setujui LKPj Wali Kota 2025

Tegaskan Fungsi Pengawasan dan Rekomendasi Strategis

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan II Tahun 2026, Senin (4/5).

Rapat yang digelar dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) 7, 8, dan 9, pengambilan keputusan DPRD, serta sambutan wali kota tersebut menjadi puncak dari rangkaian evaluasi kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang selama satu tahun anggaran.

Persetujuan LKPj ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, dan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, yang turut disaksikan sekretaris daerah dan sekretaris DPRD.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa proses pembahasan LKPj telah dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme internal DPRD dengan membentuk tiga panitia khusus.

"Pansus 7 membahas terkait pendapatan daerah, Pansus 8 fokus pada belanja daerah, dan Pansus 9 mengkaji realisasi serta capaian kinerja pemerintah daerah," ujar Hertza.

Dia menyebutkan, hasil pembahasan pansus tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD yang bersifat strategis, mencakup saran, masukan, hingga koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rekomendasi itu tidak hanya memotret capaian program dan kegiatan, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan serta langkah penyelesaian pada setiap urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya kebijakan strategis kepala daerah, pelaksanaannya, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

Menurut Hertza, seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ia pun menegaskan, rekomendasi DPRD menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. "Rekomendasi ini menjadi catatan strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan LKPj.

Dia menyebut, rekomendasi DPRD merupakan masukan berharga bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. "Kami menerima seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD dengan sikap terbuka dan komitmen penuh untuk menindaklanjutinya," ujar Saparudin.

Dia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara serius, terukur, dan terencana, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh tahapan penyampaian dan pembahasan LKPj Wali Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Maret 2026. (adv/t2)







> Rekomendasi ini menjadi catatan strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan

ABANG HERTZA, SH, MH.
KETUA DPRD KOTA PANGKALPINANG





BANGKAPOS.COM/ANDONI OVI HASIANAN

RAPAT PARIPURNA - Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (4/5).

Sumber : Bangka Pos
Tanggal : 5 Mei 2026
Halaman : 9
Klasifikasi : Retribusi Banyak Bocor "Pemkot Siapkan Peluncuran Aplikasi Terpadu"

bangkapos
@bangkapos
@bangkapos
bangkapos_

Pangkalpinang Square

Spirit Negeri Serumpun Sebalai

9
SELASA
5 MEI 2026
MANAGED BY
Tribun



BANGKAPOS.COM/NADIA DWI MASNAH

SALAMI ANGGOTA DPRD - Wali Kota Pangkalpinang Saparudin (tengah) menyalami anggota DPRD Kota Pangkalpinang usai Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Wali Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).

Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Bangka Pos
Tanggal : 5 Mei 2026
Halaman : 9
Klasifikasi : Retribusi Banyak Bocor "Pemkot Siapkan Peluncuran Aplikasi Terpadu"

Retribusi Banyak Bocor

▶ Pemkot Siapkan Peluncuran Aplikasi Terpadu

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Ada tiga isu utama yang harus segera disikapi serius oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ketiga isu tersebut adalah mengenai kebocoran retribusi dan pajak daerah, pembaruan regulasi daerah, serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Demikian disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab disapa Udin, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5).



BANGKA POS/ANDINI DWI HASANAH

> Yang pertama, masih banyaknya kebocoran pada sektor retribusi dan pajak. Salah satu penyebabnya adalah sistem yang masih manual
>
> **SAPARUDIN**
> WALI KOTA PANGKALPINANG

"Yang pertama, masih banyaknya kebocoran pada sektor retribusi dan pajak. Salah satu penyebabnya adalah sistem yang masih manual," kata Udin kepada awak media.

Menurutnya, sistem manual membuka celah terjadinya ketidakefisienan hingga potensi kebocoran pendapatan daerah. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Sebagai langkah konkret untuk menutup potensi kebocoran pendapatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga tengah menyiapkan peluncuran aplikasi terpadu atau super app Pangkalpinang. Rencananya, aplikasi tersebut akan diluncurkan dua bulan

● ke halaman 11

Perparkiran Berbasis Digital

PEMERINTAH Kota Pangkalpinang Belitung menggalakkan inovasi smart parking guna meningkatkan penerimaan retribusi parkir kendaraan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

"Saat ini kita menggalakkan smart parking untuk memaksimalkan pendapatan lahan parkir," kata Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Welly A Riduan, Senin (4/5).

Welly menuturkan, penggalakan smart parking yang merupakan parkir berbasis digital, sebagai upaya Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang untuk mencapai target retribusi parkir tepi jalan umum 2026 sebesar Rp2 miliar atau meningkat

● ke halaman 11

Dishub Catat Penerimaan Rp430 Juta

DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Pangkalpinang mencatat kenaikan penerimaan retribusi parkir pada triwulan I 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dari Rp395 juta menjadi Rp430 juta.

"Peningkatan ini karena ditingkatkan pengawasan dan mitigasi tempat-tempat keramaian untuk menambah titik baru parkir ini," kata Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Kota Pangkalpinang Welly A Riduan, Senin (4/5).



BANGKA POS/DOK

Welly A Riduan

Realisasi penerimaan retribusi parkir pada triwulan I 2026 sebesar Rp430 juta tersebut dengan perincian, yakni penerimaan retribusi parkir di jalan umum Rp320 juta dan tempat khusus parkir Rp110juta.

Sementara itu, penerimaan retribusi parkir pada triwulan I 2025 sebesar Rp395 juta den-

● ke halaman 11

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Bangka Pos
Tanggal : 5 Mei 2026

Halaman : 11
Klasifikasi : Retribusi Banyak Bocor "Pemkot Siapkan Peluncuran Aplikasi Terpadu"

Retribusi

Sambungan Hal.9

mendatang.

"Nantinya, sistem retribusi seperti parkir dan sampah sudah berbasis digital menggunakan QRIS," ujar Udin.

Dari sisi kesiapan teknologi, lanjut dia, aplikasi tersebut telah rampung dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian regulasi teknis sebagai payung hukum implementasinya.

"Kalau dari sisi aplikasi sudah selesai, tinggal peraturan teknis yang sedang kita bahas," kata Udin.

Langkah digitalisasi tersebut diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus menjawab berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRD dalam pembahasan LKPj Wali Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Udin menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta sinergi dengan instansi terkait.

"Koordinasi lintas OPD masih perlu diperkuat. Ini penting agar program-program yang dijalankan bisa lebih optimal dalam pelaksanaannya," katanya.

Selain itu, Udin juga menekankan perlunya pembaruan regulasi daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun peraturan wali kota (perwako), agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

"Perda dan perwako harus terus kita evaluasi dan revisi, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, persoalan aset daerah juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pangkalpinang. Udin mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 1.500 aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum tersertifikasi, termasuk jalan setapak.

"Yang sudah tersertifikasi sekitar 2.500 aset. Tahun ini kita targetkan 700 aset lagi bisa diselesaikan, dan mudah-mudahan dalam dua tahun ke depan seluruhnya tuntas," tuturnya. **(t2)**

Perparkiran

Sambungan Hal.9

dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,1 miliar.

"Kita menargetkan smart parking ini bisa memaksimalkan penerimaan lahan parkir tepi jalan umum sekitar Rp500 juta hingga Rp1 miliar," ujarnya.

Menurut Welly, penerapan smart parking tidak hanya meningkatkan retribusi parkir, tetapi juga untuk mendukung program smart city Wali Kota Pangkalpinang sehingga seluruh pembayaran perparkiran bisa dilakukan secara digital dan dompet digital.

"Penerapan smart parking diharapkan masyarakat bisa proaktif memberikan layanan kepada juru parkir dan memudahkan serta meminimalisir kebocoran yang ada di perparkiran ini," tuturnya.

Welly menambahkan, smart parking merupakan sistem manajemen parkir berbasis internet of things dan sensor untuk memudahkan deteksi lokasi parkir sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan masyarakat di daerah ini.

"Transaksi smart parking ini tentunya mengurangi pungli, juru parkir liar, sehingga dapat memberikan kenyamanan masyarakat di daerah ini," katanya. **(ant)**

Dishub

Sambungan Hal.9

gan perincian penerimaan retribusi parkir di jalan umum Rp287 juta dan tempat khusus parkir Rp108 juta.

"Kita sudah mendatangi tempat-tempat keramaian, seperti kafe-kafe baru untuk penambahan titik baru sehingga menambah subjek retribusi parkir ini," ujar Welly.

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, lanjut dia, melakukan pengawasan melekat untuk mencapai target retribusi tahun 2026 naik dua kali lipat dibandingkan 2025.

"Pada tahun ini, kita mendapatkan target retribusi parkir di tepi jalan umum mencapai Rp2 miliar atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,1 miliar, demikian juga target di tempat parkir khusus naik," tuturnya.

Menurut Welly, target retribusi parkir yang ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang cukup tinggi sehingga dibutuhkan sinergisitas lintas sektor dan pengembangan inovasi untuk mencapai target tersebut.

"Kami optimis target retribusi tahun ini tercapai, karena adanya pengawasan ketat dan penambahan titik-titik baru parkir di ibu kota provinsi ini," katanya. **(ant)**

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Bangka Pos
Tanggal : 5 Mei 2026

Halaman : 11
Klasifikasi : Retribusi Banyak Bocor "Pemkot Siapkan Peluncuran Aplikasi Terpadu"

3 ISU STRATEGIS & SOLUSI TRANSFORMASI KOTA PANGKALPINANG 2025

ISU UTAMA & SOLUSI DIGITAL



KEBOCORAN RETRIBUSI & PAJAK DAERAH

Sistem pengelolaan yang masih bersifat manual menjadi celah utama terjadinya inefisiensi dan potensi kebocoran pendapatan daerah.



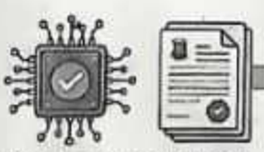
Peluncuran Super App Pangkalpinang

Aplikasi terpadu ini dijadwalkan meluncur dalam dua bulan ke depan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu genggaman.



DIGITALISASI PARKIR DAN SAMPAH VIA QRIS

Implementasi pembayaran berbasis QRIS akan segera diterapkan pada sektor retribusi parkir dan sampah guna memastikan transparansi transaksi.



KESIAPAN TEKNOLOGI & PAYUNG HUKUM

Perangkat teknologi aplikasi telah rampung 100%, dan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan regulasi teknis sebagai dasar hukum implementasinya.

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



PEMBARUAN REGULASI (PERDA & PERWAKO)

Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota perlu terus dievaluasi dan direvisi agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat di masa depan.

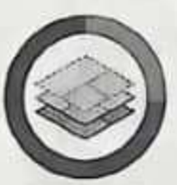




KOORDINASI LINTAS OPD

Penguatan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah menjadi kunci utama agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

MANAJEMEN ASET DAERAH



1.500 ASET BELUM TERSERTIFIKASI

Termasuk jalan-jalan setapak, masih terdapat ribuan aset milik Pemkot Pangkalpinang yang membutuhkan legalitas dokumen.



TARGET 700 SERTIFIKAT DI TAHUN 2025

Pemerintah menargetkan penyelesaian 700 sertifikat tahun ini, dengan ambisi menyelesaikan seluruh aset dalam dua tahun ke depan.

STATUS SERTIFIKASI ASET KOTA PANGKALPINANG



NotebookLM

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner